

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAKAL BAYAR
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN UTANG**



Sumber:www.brb.co.id

**Punya Kas Rp1 Triliun Lebih
Medan, (Analisa).**

Pemerintah Provinsi Sumut saat ini mengantongi uang kas Rp1 triliun lebih. Uang tersebut akan digunakan untuk membayar dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp520 miliar, Rp100 miliar untuk triwulan I SKPD dan Rp265 miliar untuk bayar utang.

“Jadi tidak benar kas kita kosong,” tegas Asisten Administrasi Umum HM Fitriyus usai rapat koordinasi dengan Komisi C DPRD Sumut di Kantor Gubsu, Selasa (24/2).

Rapat dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Ketua Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution. Hadir Plh. Sekda Provsu Sabrina, Kepala Dinas Pendapatan Rajali, Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Safrudin dan Kepala Dinas Bina Marga Effendi Pohan.

Unsur Komisi C hadir Wakil Ketua Yulizar ParLagutan Lubis, Ajie Karim, M Hafiah Harahap, Agus Napitupulu, Effendi S Napitupulu, Tiaisah Ritonga, Sonny Firdaus, Ebenejer Sitorus, Fanotona Waruwu, Khairul Anuar, Satrya Yudha Wibowo dan Jubel Tambunan.

Dalam pertemuan selama dua jam tersebut membahas 18 poin materi di antaranya evaluasi kewajiban Pemprov kepada kabupaten/kota se Sumut baik Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan Provinsi.

Dalam pertemuan itu, baik Pemprov maupun DPRD Sumut menyepakati bahwa langkah pemerintah mengeluarkan Pergub Sumut No 10/2015 untuk membayar kewajiban Pemprov kepada pihak ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran 2014 merupakan solusi terbaik.

Beberapa poin lainnya, tambah Yulizar Parlagutan menyebutkan, juga dibicarakan soal pajak air permukaan umum (APU) dari PT Inalum. “Kita minta Gubsu tidak memutuskan sendiri soal bola panas besaran pajak APU PT Inalum.

Kita minta tetap sesuai dengan perhitungan kita. Kita akan panggil Inalum bulan depan,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Komisi C juga meminta Pemprov memastikan kembali berapa sebenarnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dicapai. “Kita ingin Dispenda jujur berapa sebenarnya potensi PAD kita,” tegas Yulizar.

Bahkan di kesempatan itu, sebut Yulizar, Komisi meminta Pemprov Sumut kembali membentuk panitia khusus (pansus) aset.

Pansus ini akan memastikan berapa sebenarnya aset yang dimiliki Pemprov dan berapa persen yang dikuasai. “Soalnya, ada indikasi banyak aset Pemprov yang dikuasai pihak lain,” sebut Yulizar lagi.

Kabid APU Dispenda Sumut, Rita menyebutkan, soal pajak APU dari Inalum sampai saat ini masih belum tuntas. Pemprov kembali akan melakukan negosiasi sesuai pihak manajemen Inalum melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sumber Berita:

1. Harian Analisa, Pemprov Bakal Bayar BOS dan Utang, Rabu, 25 Februari 2015.
2. www.inimedanbung.com., DPRDSU Desak Pemprov Cairkan Dana BOS, Jumat, 13 Maret 2015.

Catatan:

- Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2015 Lampiran I Bab I Huruf B dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Huruf D ketentuan di atas menyatakan bahwa sasaran program BOS adalah semua

sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, pada Lampiran XXI disebutkan bahwa anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.080.632.800.
- Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuat di www.salur.bos.kemendikbud.go.id, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 4 tahap, yaitu Triwulan I sebesar Rp514.695.700.000, Triwulan II sebesar Rp512.719.900.000, Triwulan III sebesar Rp509.829.450.000, dan Triwulan IV belum ada realisasi.